

SIARAN PERS

OJK JALIN KERJASAMA DENGAN KPK

Tingkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Jasa Keuangan

Jakarta, 10 Maret 2016. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat menjalin kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

Nota Kesepahaman OJK dengan KPK ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad dan Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor OJK Jakarta.

Hal-hal yang diatur pada nota kesepahaman meliputi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kerjasama dalam penerapan program pencegahan tindak pidana korupsi serta bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing, dan bantuan OJK sebagai ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan.

Muliaman dalam sambutannya mengharapkan dengan nota kesepahaman ini kerjasama OJK dengan KPK yang selama ini telah terjalin khususnya pada program pencegahan tindak pidana korupsi di OJK dan ke depan di industri jasa keuangan, akan semakin efektif dalam mewujudkan *Good Governance* OJK untuk industri jasa keuangan yang terpercaya.

Menurut Muliaman, Indonesia telah belajar dari pengalaman saat krisis keuangan dan ekonomi tahun 1998 dan 2008, bahwa penerapan *good governance* menjadi sangat penting. Penerapan prinsip-prinsip *governance* yang kurang baik diidentifikasi sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis keuangan tersebut.

Mengingat begitu pentingnya *governance*, OJK sejak awal pendiriannya memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk pembangunan dan penerapan *governance* yang efektif untuk membangun kapasitas dan kredibilitas OJK maupun mendorong terciptanya industri dengan kualitas *governance* yang dapat diandalkan.

Penerapan *governance* di Indonesia belakangan menunjukkan perbaikan. Data Transparansi Internasional menunjukkan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi

Indonesia dari 34 di tahun 2014 menjadi 36 (nilai maksimum 100) di tahun tahun 2015 sehingga peringkat Indonesia naik dari 107 menjadi 88 dari 167 negara.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perlu upaya bersama untuk mengakselerasikan implementasi prinsip-prinsip *good governance*, utamanya di sektor industri jasa keuangan. Mengingat semua sektor di Indonesia berhubungan dengan industri jasa keuangan, perbaikan penerapan *good governance* di industri jasa keuangan diharapkan dapat ditransmisikan ke sektor yang lain.

Informasi lebih lanjut:

Slamet Edy Purnomo, Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional.

Email epurnomo@ojk.go.id. www.ojk.go.id Tlp: 021-29600000.